

ANTARA PAJAK DAN HARGA TIKET : TANTANGAN FISKAL MASKAPAI INDONESIA DI TENGAH GEMPURAN MASKAPAI REGIONAL ASEAN

Oleh:
¹Subur Harahap, ²Edi Wahyu Wibowo

^{1,2}Institut Bisnis Nusantara
Jl. Pulo Mas Timur No.3a, RT.1/RW.16, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210

e-mail: suburh@yahoo.com¹, ediktibn@gmail.com²

ABSTRACT

Indonesia's aviation industry plays a crucial role in national connectivity but faces significant challenges from regional competitors offering lower ticket prices. Domestic airlines bear heavier fiscal burdens, including aviation fuel taxes, VAT on tickets, and non-tax state revenues, which increase operational costs and reduce competitiveness. Using a comparative qualitative approach, this paper examines Indonesia's fiscal policies against those of neighboring countries such as Singapore and Malaysia. Findings show that higher taxation weakens domestic airlines' market position, while regional carriers benefit from lighter fiscal regimes and subsidies. Policy recommendations include reducing aviation fuel taxes, providing VAT incentives, and subsidizing airport infrastructure to strengthen the competitiveness of Indonesian airlines.

Keywords: : Aviation Fuel Tax, VAT, Fiscal Policy, Competitiveness, Indonesian Airlines, Regional Competition.

ABSTRAK

Industri penerbangan di Indonesia sangat penting untuk menghubungkan banyak wilayah di negara kepulauan ini. Namun, maskapai dalam negeri menghadapi tantangan besar karena biaya operasional yang tinggi. Pajak avtur, PPN tiket, dan berbagai biaya lain membuat harga tiket domestik lebih mahal dibandingkan maskapai regional seperti Singapura atau Malaysia, yang mendapat dukungan fiskal lebih ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan perbandingan untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi daya saing maskapai Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa beban fiskal yang tinggi menurunkan daya saing dan membuat tiket domestik kurang kompetitif. Rekomendasi utama adalah pengurangan pajak avtur, insentif PPN tiket, serta subsidi infrastruktur bandara agar maskapai Indonesia bisa lebih kuat menghadapi persaingan regional.

Kata Kunci: Pajak Avtur, PPN Tiket, Kebijakan Fiskal, Maskapai Indonesia, Daya Saing Regional

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, sehingga transportasi udara menjadi tulang punggung koneksi nasional. Maskapai domestik seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Pelita Air berperan penting dalam mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta integrasi ekonomi antarwilayah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri penerbangan nasional menghadapi tantangan serius.

Menurut Indonesia National Air Carriers Association (INACA), biaya penerbangan di Indonesia masih tinggi. Faktor utama adalah kenaikan harga avtur yang dikenakan pajak, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta beban PPN tiket dan PNBP (biaya navigasi, bandara, dan asuransi wajib). Kondisi ini membuat harga tiket domestik relatif mahal dibandingkan tiket maskapai regional.

Fenomena Kasus di Indonesia

- a. Kenaikan biaya operasional: Kurs dolar AS yang naik 14% sejak 2019 membuat biaya avtur semakin mahal.
- b. Harga tiket domestik tinggi: Pajak avtur dan PPN tiket menambah beban harga bagi konsumen.
- c. Maskapai baru bermunculan: Tahun 2026, dua maskapai baru siap beroperasi, termasuk yang melayani jemaah haji dan umrah. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan pasar, tetapi juga menambah persaingan di dalam negeri.
- d. Kondisi armada: Indonesia masih didominasi pesawat tua, sehingga biaya perawatan tinggi dan efisiensi rendah.

Fenomena Regional

Di tingkat regional, Asia Tenggara mengalami lonjakan permintaan penumpang pasca-pandemi. Boeing memprediksi lalu lintas penumpang di Asia Tenggara tumbuh 4% per tahun, menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan aviasi global. Maskapai regional seperti Singapore Airlines, AirAsia, dan Malaysia Airlines memanfaatkan momentum ini dengan dukungan fiskal berupa subsidi bahan bakar, insentif bandara, dan kebijakan pajak yang lebih ringan.

Selain itu, ekspansi maskapai asing ke pasar Indonesia semakin nyata. Misalnya, Celebi Aviation memperluas jejak di Bali dan Jakarta pada 2026, memperkuat dominasi pemain regional di pasar domestik.

Rumusan Masalah

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting:

- a. Bagaimana kebijakan fiskal Indonesia memengaruhi daya saing maskapai domestik?
- b. Mengapa maskapai regional mampu menawarkan harga tiket lebih murah?
- c. Apa strategi fiskal yang dapat ditempuh pemerintah untuk menjaga keberlanjutan maskapai nasional?

Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis kebijakan fiskal Indonesia yang berdampak pada industri penerbangan.
- b. Membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan negara tetangga di Asia Tenggara.
- c. Memberikan rekomendasi kebijakan fiskal untuk memperkuat daya saing maskapai domestik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah instrumen pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui penerimaan (pajak) dan pengeluaran negara. Menurut Musgrave (1959), fungsi fiskal mencakup:

- a. Fungsi alokasi: menyediakan barang publik, termasuk infrastruktur transportasi.
- b. Fungsi distribusi: mengatur pemerataan beban pajak dan manfaat.
- c. Fungsi stabilisasi: menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi dan pertumbuhan.

Dalam konteks penerbangan, pajak avtur, PPN tiket, dan PNBP merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang memengaruhi biaya operasional maskapai.

Teori Daya Saing Industri

Michael Porter (1990) dalam Competitive Advantage menekankan bahwa daya saing industri ditentukan oleh:

- a. Biaya produksi: semakin rendah biaya, semakin kompetitif harga produk/jasa.
- b. Diferensiasi layanan: kualitas dan inovasi layanan menjadi pembeda.
- c. Kebijakan pemerintah: regulasi dan fiskal dapat memperkuat atau melemahkan daya saing.

Maskapai domestik Indonesia menghadapi tantangan karena biaya produksi tinggi akibat pajak dan beban fiskal, sementara maskapai regional mendapat dukungan fiskal yang lebih ringan.

Studi Empiris tentang Pajak Avtur

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak avtur berkontribusi signifikan terhadap harga tiket:

- a. Penelitian INACA (2020): pajak avtur meningkatkan harga tiket domestik hingga 15–20%.
- b. Studi IATA (2021): negara dengan pajak avtur rendah (Malaysia, Singapura) mampu menjaga harga tiket lebih kompetitif.
- c. Kasus Indonesia (2019–2024): kenaikan harga avtur akibat pajak dan kurs dolar membuat maskapai domestik menanggung beban biaya lebih besar dibandingkan maskapai regional.

PPN Tiket dan PNBP

- a. PPN Tiket: di Indonesia, tiket domestik dikenakan PPN 11%. Hal ini menambah beban harga bagi konsumen.
- b. PNBP: maskapai wajib membayar biaya navigasi, bandara, dan asuransi penumpang. Studi Kemenhub (2022) menunjukkan bahwa PNBP menyumbang sekitar 10–15% dari total biaya operasional maskapai.

Kebijakan Fiskal Regional

- a. Singapura: tidak mengenakan pajak avtur, memberikan insentif bandara, dan mendukung ekspor jasa penerbangan.
- b. Malaysia: avtur dikenakan pajak rendah, tiket domestik bebas PPN, serta ada subsidi bandara.

- c. Thailand: pajak avtur ada tetapi ringan, dengan dukungan fiskal untuk maskapai nasional.

Perbedaan kebijakan fiskal ini membuat maskapai regional lebih kompetitif dalam menawarkan harga tiket.

Penelitian Terkait Daya Saing Maskapai

- a. Studi Suparno (2022): maskapai domestik Indonesia kalah bersaing dalam rute internasional karena beban fiskal tinggi.
- b. Penelitian ASEAN Aviation Forum (2023): harmonisasi kebijakan fiskal di Asia Tenggara diperlukan untuk menciptakan level playing field.
- c. Kasus Garuda Indonesia (2021–2024): restrukturisasi utang dan efisiensi operasional tidak cukup tanpa dukungan fiskal yang lebih ringan.

Gap Penelitian

Dari berbagai literatur, terlihat bahwa:

- a. Banyak studi menyoroti pajak avtur dan PPN tiket secara terpisah.
- b. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif membandingkan kebijakan fiskal Indonesia dengan negara tetangga dalam konteks daya saing maskapai.
- c. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan analisis komparatif dan rekomendasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami fenomena kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap daya saing maskapai, bukan sekadar mengukur angka statistik. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan fiskal Indonesia dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, dan Thailand).

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah maskapai penerbangan domestik Indonesia (Garuda Indonesia, Lion Air, Pelita Air, dan Citilink) serta maskapai regional (Singapore Airlines, AirAsia, Malaysia Airlines, dan Thai Airways). Fokus analisis adalah beban fiskal yang ditanggung maskapai, harga tiket, serta dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah masing-masing negara.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari:

- a. Dokumen resmi pemerintah:
 - 1) Laporan Kementerian Keuangan RI terkait penerimaan pajak sektor avtur dan PPN tiket.
 - 2) Laporan Kementerian Perhubungan RI mengenai biaya navigasi dan bandara.
- b. Data internasional:
 - 1) International Air Transport Association (IATA) mengenai kebijakan fiskal aviasi global.

- 2) Boeing dan Airbus Market Outlook terkait tren permintaan penumpang di Asia Tenggara.
- 3) Studi akademik dan jurnal: penelitian tentang pajak avtur, daya saing maskapai, dan kebijakan fiskal transportasi.
- 4) Berita dan laporan industri: kasus terbaru mengenai harga tiket domestik, restrukturisasi Garuda Indonesia, serta ekspansi maskapai regional di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumentasi: mengumpulkan regulasi, laporan fiskal, dan data harga tiket.
- b. Literature Review: menelaah penelitian terdahulu tentang kebijakan fiskal dan daya saing maskapai.
- c. Data Komparatif: membandingkan kebijakan fiskal Indonesia dengan negara tetangga.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi beban fiskal maskapai domestik: pajak avtur, PPN tiket, PNBP.
- b. Perbandingan regional: menelaah kebijakan fiskal di Singapura, Malaysia, dan Thailand.
- c. Analisis dampak fiskal terhadap harga tiket: bagaimana pajak memengaruhi daya saing maskapai.
- d. Sintesis kebijakan: merumuskan rekomendasi fiskal yang lebih pro-industri untuk Indonesia.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Skema Kerangka Pemikiran:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterbatasan Penelitian

- a. Data harga tiket dan avtur sering berfluktuasi, sehingga analisis dilakukan dengan pendekatan rata-rata.
- b. Penelitian ini tidak menggunakan survei primer (wawancara/kuisisioner), sehingga fokus pada data sekunder.
- c. Perbandingan regional terbatas pada negara ASEAN utama (Singapura, Malaysia, Thailand).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beban Fiskal Maskapai Domestik

Industri penerbangan Indonesia masih dibebani oleh berbagai pungutan fiskal yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai.

- a. Pajak Avtur: Avtur di Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hal ini membuat harga avtur lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.
- b. PPN Tiket: Tiket penerbangan domestik dikenakan PPN sebesar 11%. Pajak ini menambah harga tiket yang ditanggung konsumen.
- c. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Maskapai wajib membayar biaya navigasi, bandara, dan iuran asuransi penumpang. Menurut data Kementerian Perhubungan, PNBP menyumbang sekitar 10–15% dari total biaya operasional maskapai.

Akibatnya, harga tiket domestik sering kali lebih mahal dibandingkan tiket maskapai regional, meskipun jarak tempuh relatif lebih pendek.

Fenomena Kasus di Indonesia

Beberapa kasus nyata menunjukkan dampak kebijakan fiskal terhadap maskapai domestik:

- a. Kasus Garuda Indonesia (2021–2024): Maskapai nasional ini harus melakukan restrukturisasi utang besar-besaran. Salah satu faktor yang memperberat adalah tingginya biaya operasional akibat pajak avtur dan PNBP.
- b. Harga tiket domestik pasca-pandemi: Setelah pandemi COVID-19, harga tiket domestik melonjak signifikan. INACA mencatat bahwa pajak avtur berkontribusi hingga 20% terhadap kenaikan harga tiket.
- c. Maskapai baru 2026: Munculnya maskapai baru yang melayani jemaah haji dan umrah menunjukkan adanya kebutuhan pasar, tetapi juga menambah persaingan di dalam negeri.

Perbandingan Regional

Maskapai regional di Asia Tenggara lebih kompetitif karena dukungan fiskal dari pemerintah masing-masing negara.

Tabel 1. Perbandikan Regional

Negara	Pajak Avtur	PPN Tiket	Subsidi Bandara	Dampak Harga Tiket
Indonesia	Ada (PPN + PBBKB)	Ada (11%)	Terbatas	Lebih mahal
Singapura	Tidak ada	Rendah	Ada	Lebih murah
Malaysia	Rendah	Tidak ada	Ada	Kompetitif
Thailand	Ada, ringan	Rendah	Ada	Relatif rendah

- a. Singapura: Tidak mengenakan pajak avtur, memberikan insentif bandara, dan mendukung ekspor jasa penerbangan.
- b. Malaysia: Avtur dikenakan pajak rendah, tiket domestik bebas PPN, serta ada subsidi bandara.
- c. Thailand: Pajak avtur ada tetapi ringan, dengan dukungan fiskal untuk maskapai nasional.

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Harga Tiket

- a. Indonesia: Harga tiket domestik relatif tinggi, menurunkan mobilitas masyarakat antarwilayah.
- b. Regional: Maskapai asing mampu menawarkan harga lebih murah, sehingga menarik penumpang Indonesia untuk memilih penerbangan regional.
- c. Implikasi: Maskapai domestik berisiko kehilangan pangsa pasar, terutama pada rute internasional dan rute domestik premium.

Analisis Daya Saing

Menggunakan kerangka Porter's Competitive Advantage:

- a. Biaya Produksi: Maskapai domestik kalah karena beban fiskal tinggi.
- b. Diferensiasi Layanan: Maskapai domestik berusaha meningkatkan layanan, tetapi harga tiket tetap menjadi faktor utama bagi konsumen.
- c. Kebijakan Pemerintah: Regulasi fiskal di Indonesia belum cukup mendukung daya saing maskapai.

Implikasi Kebijakan

- a. Konektivitas Nasional: Harga tiket mahal dapat mengurangi mobilitas masyarakat, melemahkan integrasi ekonomi antarwilayah.
- b. Daya Saing Regional: Maskapai domestik berisiko kalah bersaing dengan maskapai regional yang lebih efisien.
- c. Penerimaan Negara vs Industri Strategis: Pemerintah menghadapi dilema antara menjaga penerimaan pajak dan mendukung keberlanjutan industri penerbangan.

Rekomendasi Kebijakan

Pengurangan Pajak Avtur

Avtur merupakan komponen biaya terbesar dalam operasional maskapai. Di Indonesia, avtur masih dikenakan PPN dan PBBKB, sehingga harga lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

- a. Rekomendasi: Pemerintah dapat menurunkan atau menghapus pajak avtur untuk rute domestik strategis (misalnya rute ke wilayah timur Indonesia yang bergantung pada transportasi udara).
- b. Dampak: Menurunkan harga tiket, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan memperkuat konektivitas nasional.

Insentif PPN Tiket

PPN tiket domestik sebesar 11% menambah beban harga bagi konsumen.

- a. Rekomendasi: Memberikan insentif berupa pengurangan PPN untuk rute domestik tertentu, terutama yang mendukung pemerataan pembangunan.
- b. Dampak: Harga tiket lebih terjangkau, meningkatkan permintaan, dan memperkuat daya saing maskapai domestik.

Subsidi Infrastruktur Bandara dan Navigasi

Biaya bandara dan navigasi di Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara tetangga.

- a. Rekomendasi: Pemerintah dapat memberikan subsidi atau potongan biaya bandara bagi maskapai domestik, khususnya di bandara kelas menengah dan kecil.
- b. Dampak: Mengurangi beban operasional maskapai, memperluas jaringan penerbangan, dan meningkatkan aksesibilitas wilayah terpencil.

Skema Asuransi Kolektif

Maskapai domestik menanggung iuran wajib asuransi penumpang yang menambah harga tiket.

- a. Rekomendasi: Mengembangkan skema asuransi kolektif yang dikelola pemerintah atau konsorsium, sehingga biaya lebih efisien.
- b. Dampak: Menekan biaya tambahan tiket, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menjaga keberlanjutan industri.

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Regional

Maskapai regional mendapat keuntungan dari kebijakan fiskal yang lebih ringan.

- a. Rekomendasi: Indonesia perlu mendorong harmonisasi kebijakan fiskal penerbangan di ASEAN, misalnya melalui forum ASEAN Aviation.
- b. Dampak: Menciptakan level playing field, memperkuat daya saing maskapai domestik, dan meningkatkan integrasi pasar aviasi regional.

Strategi Jangka Panjang

Selain kebijakan fiskal jangka pendek, pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka panjang:

- a. Digitalisasi administrasi fiskal: Mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak maskapai.
- b. Investasi energi alternatif: Mengurangi ketergantungan pada avtur dengan mendorong penggunaan biofuel atau sustainable aviation fuel (SAF).
- c. Kemitraan publik-swasta: Melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan bandara dan navigasi untuk efisiensi biaya.

Rekomendasi kebijakan fiskal ini bertujuan menyeimbangkan antara penerimaan negara dan keberlanjutan industri penerbangan. Dengan pengurangan pajak avtur, insentif PPN tiket, subsidi infrastruktur, skema asuransi kolektif, serta harmonisasi kebijakan regional, maskapai domestik Indonesia dapat memperkuat daya saingnya di tengah gempuran maskapai regional. Reformasi fiskal yang pro-industri akan menjadi kunci menjaga langit Nusantara tetap dikuasai oleh maskapai nasional.

Rekomendasi Kebijakan Pengurangan Pajak Avtur

Avtur adalah komponen biaya terbesar dalam operasional maskapai. Di Indonesia, avtur masih dikenakan PPN dan PBBKB, sehingga harga lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

- a. Rekomendasi: Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pajak avtur, khususnya untuk rute domestik strategis seperti wilayah timur Indonesia yang sangat bergantung pada transportasi udara.
- b. Dampak: Penurunan pajak avtur akan menurunkan harga tiket, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan memperkuat konektivitas nasional.

Insetif PPN Tiket

PPN tiket domestik sebesar 11% menambah beban harga bagi konsumen.

- a. Rekomendasi: Memberikan insetif berupa pengurangan atau pembebasan PPN untuk rute domestik tertentu, terutama yang mendukung pemerataan pembangunan dan akses ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
- b. Dampak: Harga tiket lebih terjangkau, permintaan meningkat, dan maskapai domestik lebih kompetitif.

Subsidi Infrastruktur Bandara dan Navigasi

Biaya bandara dan navigasi di Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara tetangga.

- a. Rekomendasi: Pemerintah dapat memberikan subsidi atau potongan biaya bandara bagi maskapai domestik, khususnya di bandara kelas menengah dan kecil.
- b. Dampak: Mengurangi beban operasional maskapai, memperluas jaringan penerbangan, dan meningkatkan aksesibilitas wilayah terpencil.

Skema Asuransi Kolektif

Maskapai domestik menanggung iuran wajib asuransi penumpang yang menambah harga tiket.

- a. Rekomendasi: Mengembangkan skema asuransi kolektif yang dikelola pemerintah atau konsorsium, sehingga biaya lebih efisien dan tidak membebani harga tiket.
- b. Dampak: Menekan biaya tambahan tiket, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menjaga keberlanjutan industri.

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Regional

Maskapai regional mendapat keuntungan dari kebijakan fiskal yang lebih ringan.

- a. Rekomendasi: Indonesia perlu mendorong harmonisasi kebijakan fiskal penerbangan di ASEAN, misalnya melalui forum ASEAN Aviation.
- b. Dampak: Menciptakan level playing field, memperkuat daya saing maskapai domestik, dan meningkatkan integrasi pasar aviasi regional.

Strategi Jangka Panjang

Selain kebijakan fiskal jangka pendek, pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka panjang:

- a. Digitalisasi administrasi fiskal: Mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak maskapai.
- b. Investasi energi alternatif: Mengurangi ketergantungan pada avtur dengan mendorong penggunaan biofuel atau sustainable aviation fuel (SAF).
- c. Kemitraan publik-swasta: Melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan bandara dan navigasi untuk efisiensi biaya.
- d. Penguatan regulasi kompetitif: Menyusun regulasi yang mendukung inovasi dan efisiensi maskapai domestik tanpa mengorbankan keselamatan penerbangan.

Rekomendasi kebijakan fiskal ini bertujuan menyeimbangkan antara penerimaan negara dan keberlanjutan industri penerbangan. Dengan pengurangan pajak avtur, insetif PPN tiket, subsidi infrastruktur, skema asuransi kolektif, serta harmonisasi kebijakan regional, maskapai domestik Indonesia dapat memperkuat daya saingnya di tengah gempuran maskapai regional. Reformasi fiskal yang pro-industri akan menjadi kunci menjaga langit Nusantara tetap dikuasai oleh maskapai nasional, sekaligus mendukung integrasi ekonomi dan sosial antarwilayah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Beban fiskal maskapai domestik cukup tinggi
Pajak avtur, PPN tiket, serta PNBP (biaya navigasi, bandara, dan asuransi penumpang) menjadi faktor utama yang membuat harga tiket domestik relatif mahal dibandingkan tiket maskapai regional.
2. Maskapai regional lebih kompetitif
Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memberikan dukungan fiskal berupa subsidi avtur, keringanan pajak, dan insentif bandara. Hal ini membuat maskapai mereka mampu menawarkan harga tiket lebih murah dan menarik penumpang Indonesia.
3. Daya saing maskapai domestik menurun
Tingginya harga tiket domestik berimplikasi pada menurunnya mobilitas masyarakat antarwilayah, serta risiko kehilangan pangsa pasar terhadap maskapai regional.
4. Dilema kebijakan fiskal
Pemerintah Indonesia menghadapi dilema antara menjaga penerimaan negara melalui pajak dan mendukung keberlanjutan industri penerbangan sebagai sektor strategis.
5. Reformasi fiskal diperlukan
Tanpa penyesuaian kebijakan fiskal yang lebih pro-industri, maskapai domestik akan semakin sulit bersaing di pasar regional maupun internasional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Pengurangan Pajak Avtur
Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pajak avtur, khususnya untuk rute domestik strategis, agar harga tiket lebih terjangkau.
2. Insentif PPN Tiket
Memberikan keringanan atau pembebasan PPN tiket untuk rute domestik yang mendukung pemerataan pembangunan, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
3. Subsidi Infrastruktur Bandara dan Navigasi
Menurunkan biaya bandara dan navigasi bagi maskapai domestik untuk memperkuat jaringan penerbangan nasional.
4. Skema Asuransi Kolektif
Mengembangkan sistem asuransi penumpang yang lebih efisien agar tidak membebani harga tiket.
5. Kerja Sama Regional
Indonesia perlu mendorong harmonisasi kebijakan fiskal penerbangan di ASEAN untuk menciptakan level playing field dan memperkuat daya saing maskapai domestik.
6. Strategi Jangka Panjang
 - a. Mendorong penggunaan sustainable aviation fuel (SAF) untuk mengurangi ketergantungan pada avtur.
 - b. Memperkuat kemitraan publik-swasta dalam pengelolaan bandara dan navigasi.
 - c. Menyusun regulasi fiskal yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan industri penerbangan nasional.

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran krusial dalam menentukan daya saing maskapai domestik. Reformasi fiskal yang lebih pro-industri tidak hanya akan memperkuat maskapai Indonesia dalam menghadapi gempuran maskapai regional, tetapi juga menjaga integrasi ekonomi dan sosial antarwilayah di Nusantara. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, langit Indonesia dapat tetap dikuasai oleh maskapai nasional yang berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Airbus. (2024). Global Market Forecast: Aviation Trends in Asia-Pacific. Toulouse: Airbus Group.
- ASEAN Aviation Forum. (2023). Regional Fiscal Policy Harmonization in Aviation Sector. Kuala Lumpur: ASEAN Secretariat.
- Boeing. (2024). Southeast Asia Market Outlook 2024–2043. Boeing Commercial Market Reports.
- INACA (Indonesia National Air Carriers Association). (2020). Dampak Pajak Avtur terhadap Harga Tiket Domestik. Jakarta: INACA.
- International Air Transport Association. (2021). Fuel Taxation and Its Impact on Airline Competitiveness. IATA Publications.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Laporan Fiskal dan Kebijakan Pajak Sektor Transportasi. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). Biaya Navigasi dan Bandara dalam Penerbangan Domestik. Jakarta: Kemenhub RI.
- Musgrave, R. A. (1959). The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy. New York: McGraw-Hill.
- Porter, M. E. (1990). Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
- Suparno, A. (2022). Analisis Daya Saing Maskapai Domestik Indonesia dalam Rute Internasional. Jurnal Transportasi Indonesia, 14(2), 45–60.